

GERAKAN ANTI MODAL ASING PADA AWAL PEMERINTAHAN ORDE BARU (1967-1974)

Azaria Putri Randi¹, Maskun², Yustina Sri Ekwandari³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung
Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding e-mail:-

ABSTRAK

Gerakan Anti Modal Asing pada Awal Pemerintahan Orde Baru (1967-1974). Memasuki era Orde Baru, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Penanaman Modal Asing Tahun 1967 untuk mengundang para investor asing ke Indonesia dalam rangka pemulihan ekonomi pasca era Orde Lama. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya gerakan anti modal asing yang berasal dari negara Jepang pada tahun 1967-1974. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis historis, sebuah kegiatan yang diawali dengan pengumpulan data yang kemudian melakukan kritik sumber sesuai dengan kebutuhan penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor terjadinya gerakan anti modal asing terbagi menjadi dua, yakni faktor utama dan faktor pendukung. Sikap pemerintah yang tidak menghiraukan kritik mengenai modal asing oleh para mahasiswa menyebabkan terjadinya gerakan anti modal asing yang terus memuncak hingga awal tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ini adalah gerakan ini pada awalnya hanya kritikan-kritikan tajam yang disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, namun kritikan-kritikan tersebut berkembang menjadi sebuah demonstrasi.

Kata Kunci: Modal Asing, Mahasiswa, Pemerintah.

ABSTRACT

The Anti Foreign Capital Movement At The Beginning Of The New Order Government (1967-1974). Entering the era of the New Order, the Government issued a policy in the form of the enactment of Law Number 1 concerning Foreign Investment in 1967 to invite foreign investors to Indonesia in the context of the economic recovery after the era of the Old Order. The purpose of this study was to determine the factors that led to the existence of foreign anti-capital movements originating from Japan in 1967 and 1974. The research method used in this study is historical research method with four stages, namely Heuristics, Critics, Interpretation, and Historiography. The data analysis technique used is historical analysis technique, an activity that begins with data collection which then conducts source criticism in accordance with the research needs. The results of this study indicate that the factors of the occurrence of foreign anti-capital movements are divided into two, namely key factors and supporting factors. The government's attitude of ignoring criticism of foreign capital by students led to a foreign anti-capital movement that continued to peak until the beginning of 1974. The conclusion of this study is that this movement was initially only a sharp criticism conveyed through mass media such as newspapers, but the criticism developed into a demonstration.

Keywords: Foreign Capital, Students, Government.

I. PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan pada suatu negara agar berfungsi dengan baik. Setiap negara memiliki ciri dan karakteristik yang khas, sehingga memiliki cara tersendiri dalam mengelola maupun mengatasi berbagai masalah-masalah negara, salah satunya pada bidang ekonomi. Cara atau metode tersebut dinamakan sistem ekonomi (*accurate.id*)

Memasuki masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945-1967, Indonesia mengalami tiga fase perekonomian di era Presiden Sukarno. Fase pertama yakni penataan ekonomi pasca kemerdekaan, fase kedua yaitu memperkuat pilar ekonomi, serta fase ketiga yakni masa krisis yang mengakibatkan inflasi (*jeo.kompas.com*).

Pada tahun 1950-1957, Pemerintah memberikan bantuan berupa kredit pada perusahaan pribumi dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional, menumbuhkan wiraswastawan pribumi, mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing. Namun hal ini tidak berjalan karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif, dan kurang berpengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah (Saefuloh.2017:2). Pada tahun 1959-1967, struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme dimana segalanya diatur oleh pemerintah yang diharapkan akan membawa kemakmuran dan persamaan sosial, politik, dan ekonomi sesuai dengan Mazhab Sosialisme. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat itu adalah dengan membuat kebijakan devaluasi yaitu menurunkan nilai uang kertas dan pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Namun kebijakan-kebijakan tersebut gagal karena pemerintah tidak menghemat pengeluarannya untuk membuat proyek-proyek, serta akibat konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat (Saefuloh.2017:2-3).

Pasca berakhirnya Demokrasi Terpimpin, MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/ 1966 Tentang Pembentukan Kabinet Ampera untuk menggantikan Kabinet Dwikora pada masa Demokrasi Terpimpin, guna melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (Poesponegoro,dkk.2011:565).

Langkah-langkah kebijakan yang dimulai sejak Bulan Oktober tahun 1967 sampai pertengahan 1968, merupakan kebijakan stabilisasi yang bersifat operasional penyelamatan, dengan tujuan menertibkan keuangan negara (Djojohadikusumo,S.1972-14-15). Salah satu upaya Kabinet Ampera untuk memulihkan ekonomi nasional ialah dengan memberlakukan Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA No. 1/1967) pada bulan April 1967. Pengeluaran Undang-Undang tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, karena Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa banyak investasi produktif baru diperlukan untuk mencapai tujuan ini (Abdullah, dkk.2012:155).

Pemberian modal dan bantuan dari negara-negara luar tersebut terlihat menguntungkan bagi negara-negara penanam modal maupun Negara Indonesia, namun upaya ini pada kenyataannya masih mendapatkan berbagai kritik dan protes dari mahasiswa maupun masyarakat umum yang merasakan dampak dari masuknya modal asing ke Indonesia, Kritik dan protes yang disuarakan yaitu berupa penentangan modal asing ke Indonesia, terutama modal asing dari Jepang, yang kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan anti modal asing pada awal tahun 1974.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode historis. Menurut Gilbert

J. Garraghan (Abdurrahman, 2007: 53). metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil - hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis. Menurut Nugroho Notosusanto (1984 :22-23), terdapat 4 (empat) kegiatan dalam metode penelitian sejarah yaitu : Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi dan Historiografi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa metode penelitian sejarah adalah sebuah seperangkat aturan untuk menguji dan menganalisa secara kritis terhadap sumber – sumber sejarah yang ada di masa lampau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penanaman Modal Asing Pada Era Orde Baru

Secara historis, keberadaan penanaman modal asing di Indonesia sebenarnya bukan fenomena yang baru. Penanaman modal asing di Indonesia sendiri sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Namun yang membedakan penanaman modal asing di zaman kolonial dan zaman pasca kemerdekaan hingga saat ini adalah dedikasinya yang dimana saat zaman kolonial diperuntukkan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia (Kairupan, David.2013: 23). Keterbelakangan Indonesia di bidang perekonomian pasca era Orde Lama telah menyebabkan adanya suatu usaha untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari negara-negara kaya dan maju (Novianto,Kholid.2011:79). Selain melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, Pemerintah Orde Baru juga berupaya untuk memulihkan hubungan dengan negara-negara kreditor. Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa kebijakan anti-Barat di Orde Lama telah menimbulkan kesulitan bagi Indonesia. Hubungan yang lebih baik dengan negara-negara Barat dan Jepang juga dianggap penting untuk memperoleh bantuan luar negeri untuk mendukung neraca pembayaran dan anggaran pemerintah, serta menarik investasi asing baru (Wie, Kian Thee.2011:154). Pemerintah Orde Baru menyadari bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, diperlukan banyak investasi produk baru untuk mencapai tujuan ini. Maka, pada awal tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) yang memuat berbagai insentif dan jaminan bagi para investor asing yang baru (Wie, Kian Thee. 2011:155).

Undang-Undang Penanaman Modal Asing dirancang melalui beberapa tahap. Tahap pertama, Pemerintah Orde Baru mengadakan sidang presidium Kabinet Ampera untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal Asing pada tanggal 14 November 1966 (Tim Dokumentasi Presiden RI.2003:124-125). Tahap kedua, pada tanggal 23 November 1966 membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan-Peraturan Pemerintah berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.85/U/Kep/11/1966 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, yang bertugas menyiapkan rancangan peraturan-peraturan pemerintah yang diperlukan agar dapat melaksanakan Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang penyelesaiannya diharapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1966. Tahap ketiga, pada tanggal 10 Januari 1967, Pemerintah Orde Baru mengeluarkan dan memberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967. Dalam perumusan Undang-Undang tersebut, pemerintah ingin menunjukkan pada dunia internasional bahwa Orde Baru tidak memusuhi dan menuduh investor asing sebagai kaki tangan imperialisme, melainkan aktivitas mereka dipandang sebagai prasyarat yang sangat dibutuhkan untuk sebuah negara yang ingin membangun perekonomiannya (Kusumaningrum. 2019:7).

2. Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Pada Era Orde Baru

Terdapat tiga landasan atau pedoman dalam melaksanakan penanaman modal asing di Indonesia, yaitu: 1.) Ketetapan MPRS XXIII/1966, 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, 3.) Instruksi Presidium Kabinet No.06/EK/1/1967.

Strategi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dalam menarik investasi asing adalah dengan menawarkan berbagai bentuk intensif dan fasilitas serta jaminan-jaminan agar melakukan investasi di Indonesia dan memagari kegiatan para investor asing agar tetap terkendali dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional (Harjono,DK.2012:75).

Undang-Undang PMA ini tidak membuka seluruh lapangan usaha bagi modal asing, sehingga perusahaan-perusahaan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap tertutup bagi modal asing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967:17). Bidang-bidang yang tertutup bagi modal asing terdapat pada pasal 6 UU No.1 Tahun 1967 ayat 1 dan 2, yakni pelabuhan-pelabuhan, produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, mass media, produksi senjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang.

Tiga bulan setelah dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, pada April 1967, Freeport Sulphur Incorporated milik Amerika Serikat menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya oleh ketua presidium Kabinet Ampera Jenderal Suharto (Mukhti, F.M .2015.historia.id), lalu disusul dengan memberikan investasi dalam bentuk bantuan bukan pangan sebesar sepertiga dari US \$365 juta dolar yaitu sebesar US \$126,7 juta dolar yang dilakukan secara bertahap pada bulan April tahun 1969 melalui kuasa usaha Amerika Serikat Jack Lydman dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik dengan penandatanganan persetujuan pembelian barang-barang dibawah Public Law meliputi US \$79,25 juta dolar.

Selain negara Amerika Serikat, Jepang turut memberikan bantuan kepada Indonesia dengan berbagai macam bantuan melalui ODA (Official Development Assistance), penanaman modal pada bidang manufaktur, dan lainnya. ODA merupakan "Bantuan Pembangunan Pemerintah" yang dimana bantuan tersebut diberikan oleh Pemerintah sebagai pelaku utama terhadap negara-negara berkembang dalam bentuk bantuan dana hibah, pinjaman yen, dan kerjasama teknik (id.emb-japan.go.jp). Indonesia saat itu diberi bantuan melalui pinjaman yen.

Negara-negara lain seperti Belanda, Jerman Barat, Perancis memberikan bantuan kepada Indonesia melalui bantuan kredit dan penanaman modal bidang pertambangan minyak. Pada tahun 1968, Belanda memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 25,2 juta gulden atau US \$6,3 juta dolar yang dapat digunakan dalam sistem biaya ekspor (BE). Lalu disusul dengan pelaksanaan bantuan kredit Jerman Barat kepada Indonesia telah disetujui dalam pertemuan antar negara pada tahun 1969 dimana Jerman Barat memberikan bantuan proyek sebesar US \$25 juta dan bantuan pangan sebesar US \$2 juta (Indonesia Raya,1969:3), serta penandatanganan perjanjian kredit dengan negara Perancis sebesar US \$11 juta dolar yang berlaku dengan bunga 3,4 %, dan memberikan tiga konsensi pengolahan hutan kepada Perancis yang merupakan penanaman modal sebesar US \$3 juta dolar, penanaman modal di bidang pertambangan minyak antara Pertamina dan Petroles yang meliputi jumlah antara US \$15 dan US \$17 juta dolar.

3. Dampak, Manfaat, dan Rugi Penanaman Modal Asing (PMA) di Era Orde Baru

Setiap kebijakan yang ditujukan untuk khalayak umum tentu memiliki dampak, manfaat, dan rugi termasuk pada kebijakan mengeluarkan Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing untuk menarik para investor asing ke Indonesia dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi saat itu. Salah satu dampak dari penanaman modal asing di Indonesia ialah meningkatnya pendapatan pemerintah pada tahun 1970 sebesar 80% dari tahun 1968 sehingga menjadi Rp.334,7 milyar, ekspor yang meningkat cukup pesat dari US\$864 juta pada tahun 1968 menjadi US\$1.001 pada tahun 1970. Pertumbuhan ekonomi ini terkait dengan meningkatnya penanaman modal asing pada tahun 1970 yang diperkirakan sebanyak US\$1,1 milyar yang dilakukan oleh 200 perusahaan asing, ditambah dengan pinjaman dari negara-negara pendonor, terutama dari Jepang dan Amerika Serikat yang tergabung dalam IGGI yang dari tahun ke tahun semakin besar (Usman, Sunyoto.1999:152).

Mengenai manfaat dan kerugian penanaman modal asing di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Soeharsono Sagir, SE selaku cendekiawan dalam bidang ekonomi dalam satu tulisan yang terbit di surat kabar Mahasiswa Indonesia pada tahun 1968 yang berjudul "Peranan Modal Asing dan Aspeknya dalam Perekonomian Kita". Pada tulisannya beliau menjabarkan manfaat dan kerugian adanya penanaman modal asing di Indonesia. menurut beliau, penanaman modal asing di Indonesia memberikan beberapa manfaat, yakni; 1.)Sebagai pembentukan sumber devisa yang baru, 2.) Terdapat lapangan kerja baru bagi tenaga kerja di Indonesia, tidak bergantung pada lapangan kerja sebagai pegawai negeri, 3.)Terdapat tempat latihan dan pendidikan praktek bagi lulusan sekolah kejuruan maupun universitas-universitas di Indonesia. Setelah menjabarkan manfaat modal asing, Soeharsono Sagir juga menjabarkan beberapa kerugiannya sebagai berikut ; 1.)Prosedur pemberian kredit lebih mudah bagi penanaman modal asing dibandingkan dengan industri nasional, 2.)Penggunaan alat-alat modern dalam operasinya dapat mematikan usaha nasional, 3.)Rendahnya bayaran tenaga Indonesia dibandingkan tenaga asing walau memiliki ijazah dan keahlian yang sama (surat kabar Mahasiswa Indonesia. 1968:11).

4. Deskripsi Data

4.1 Kritik Kepada Pemerintah Orde Baru

Pasca diberlakukannya penanaman modal asing di Indonesia, kritik-kritik mengenai modal asing belum terlalu digaungkan hingga pertengahan tahun 1973. Kritik dari berbagai lapisan masyarakat kepada pemerintah Orde Baru hingga sampai ke aksi protes mahasiswa mulai muncul kembali pada tahun 1970 setelah di tahun 1968 dan 1969 merupakan tahun yang cenderung tenang karena berhasil mendesak pemerintah Orde Lama untuk mengundurkan diri dari jabatan pemerintahannya. Pada tahun 1970, masyarakat hingga mahasiswa melakukan kritik dan aksi protes mengenai naiknya harga bensin dan minyak tanah, dan maraknya korupsi.

Kenaikan harga bensin dan minyak tersebut dimuat dalam surat kabar Merdeka yang terbit pada Januari 1970 yang dimana tulisan tersebut memuat pandangan para pengusaha angkutan umum dan perdagangan impor, pegawai negeri, perwakilan DPR-GR (Abdul Mukhti, SH), kaum ibu, PNI, hingga menteri perhubungan kala itu, Drs. Frans Seda. Selain menuntut turunkan harga minyak bumi dan minyak tanah, para mahasiswa juga menyorot tentang maraknya kasus korupsi. Gerakan ini muncul ketika korupsi secara perlahan mulai menggerogoti sendi pemerintahan yang kemudian berimbas pada ekonomi

rakyat dan fasilitas kampus yang semakin menyusut. Fasilitas kampus yang menyusut tersebut dirasakan oleh mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Universitas Pajajaran, dan mahasiswa di Yogyakarta (Jazimah, Ipong.2013:8). Gerakan ini yang kemudian melahirkan Komite Anti Korupsi (KAK) yang diketuai oleh Wilopo (Perdana Menteri Indonesia ke-7) di Jakarta, membentuk Bandung Bergerak (BB) oleh para mahasiswa dari berbagai universitas dan organisasi di Bandung (historia.id.2018), serta Presiden Suharto menyatakan komitmennya untuk memberantas korupsi pada persidangan di Gedung DPR Senayan Jakarta, pada tanggal 16 Agustus 1970 (tim redaksi nasional.okezone.com).

Memasuki tahun 1971, mahasiswa melancarkan sebuah gerakan yang dinamakan "Golongan Putih" yang dibentuk oleh Arief Budiman untuk menghimpun orang-orang yang tidak ikut pemilu dan mengkritik mahasiswa yang mendukung Partai Golkar (Golongan Karya). Namun hal tersebut tidak berhasil karena Partai Golkar berhasil menjadi pemenang pemilu tahun 1971 (Jazimah, Ipong.2013:10). Pada tahun 1972, mahasiswa melakukan protes mengenai kebijakan penggunaan anggaran negara untuk proyek eksklusif seperti pembangunan MII (Miniatur Indonesia Indah) yang diusulkan oleh Ibu Tien Suharto. MII merupakan sebuah taman representasi kebudayaan dari 26 provinsi di Indonesia, yang diperkirakan biaya pembangunan tersebut sebesar Rp.10,5 miliar (Hanggoro,TH.2018. historia.id.) Menurut kelompok angan. Kemudian pada tahun 1973, mahasiswa, pembangunan MII tersebut dianggap tidak sesuai dengan situasi negara yang sedang kesulitan keuhasiswa melakukan kritik mengenai strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang dimana saat itu kritik banyak ditujukan pada masalah modal asing yang dianggap memperbesar jurang perbedaan dalam masyarakat karena model pembangunan ekonomi yang dipilih ialah pertumbuhan ekonomi yang banyak dipotong oleh modal asing, sehingga dianggap sebagai 'penjajahan model baru' (M.F Mukhti.2018. *historia. id.*).

4.2 Faktor Penyebab Gerakan Anti Modal Asing

Timbulnya gerakan anti modal asing tentu tidak terlepas dari berbagai faktor penyebab. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan anti modal asing pada awal pemerintahan Orde Baru ;

4.2.1 Faktor Utama

- 1) Penilaian para mahasiswa dan masyarakat terhadap aliran modal asing di Indonesia yang kala itu dapat 'membunuh' pengusaha lokal dan memeras ekonomi Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh dr.Hariman Siregar selaku mantan ketua Dewan Mahasiswa (DEMA) UI, serta salah satu pelaku sejarah peristiwa MALARI pada salah satu wawancaranya dengan Ichan Loulembah pada *channel youtube* Kosakata bersama Ichan Loulembah yang tayang pada tanggal 12 April 2021.
- 2) Para mahasiswa mengkritik arah pembangunan pemerintah Orde Baru yang lebih mengutamakan pertumbuhan dibandingkan pemerataan. Masih pada wawancara yang sama dengan dr.Hariman Siregar, para mahasiswa saat itu menilai bahwa strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang berfokus pada pertumbuhan hanya semakin memperlihatkan jurang antara kaya dan miskin.

4.2.2 Faktor Pendukung

- 1) Rivalitas antara asisten pribadi presiden (ASPRI) yakni Jenderal Sumitro dan Ali Murtopo. Dikutip dari *historia.id*, rivalitas tersebut muncul setelah pemilu 1971 yang dimana Ali Murtopo menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus). Saat gerakan massa terjadi, hal tersebut semakin menguatkan pengelompokan pada elite kekuasaan antara Ali Murtopo dan Jenderal Sumitro, yang dimana Ali Murtopo

sebagai Aspri Suharto mengkonsolidasi kekuatan dengan merancang politik dalam wadah tunggal pada kalangan mahasiswa, pegawai negeri, wartawan, sedangkan Sumitro selaku Panglima Kopkamtib turut mendekati kampus-kampus, sampai pada sekitar akhir tahun 1973 beredar desas-desus akan terjadi kerusuhan dengan Jenderal Sumitro sebagai tertuduh utama (Pusat Data dan Analisa Tempo.2021:15).

- 2) Kelompok islam yang terdiri dari para pedagang di bidang industri tekstil yang turut mendukung mahasiswa untuk mengkritik strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang menurut mereka merugikan pihaknya. Hal ini dikemukakan oleh dr.Hariman Siregar di satu wawancara dengan Peter F. Gontha pada program televisi *impact* yang diunggah di *channel youtube* HMI Bergerak yang *diupload* pada 6 Mei 2019, bahwa kelompok Islam kala itu mendukung para mahasiswa untuk mengkritik pemerintah Orde Baru mengenai strategi pembangunan yang dinilai oleh kelompok Islam dapat merugikan pihaknya. Kelompok islam disini ialah berasal dari kalangan santri. Sejak masuknya modal asing dengan tumbuhnya sektor industri, arus modal raksasa dengan jaringan internasional berteknologi canggih yang umum dikuasai oleh golongan Cina, pengusaha, dan klien yang memiliki koneksi politik dengan sejumlah elite Orde Baru membuat semakin mendesak pengusaha dan pedagang menengah santri dan melemahkan basis-basis sosial ekonomi yang pernah menjadi tulang pendukung kekuatan politik pengikut Partai Masyumi maupun Nahdlatul Ulama (NU).
- 3) Timbulnya semangat para mahasiswa dari peristiwa jatuhnya rezim perdana menteri Marsekal Thanom Kittikachorn di Bangkok pada bulan Oktober 1973 oleh para mahasiswa di Thailand (Pusat Data dan Analisa Tempo.2020:17).

4.2.3 Jalannya Gerakan Anti Modal Asing

Gerakan anti modal asing kala itu diawali dengan pembacaan Pidato Pernyataan Diri Mahasiswa yang terdiri dari enam halaman untuk mengkritik kebijakan ekonomi dan politik pemerintah Suharto pada malam tirakatan akhir tahun 1973 yang dinilai bahwa strategi pembangunan ekonomi pemerintah saat itu hanya menguntungkan segelintir elite, dianggap terlalu mengandalkan modal asing untuk menggerakkan roda ekonomi (Padiatra.2015:112). Pasca malam tirakatan, demonstrasi mahasiswa menjadi semakin besar dan dideklarasikannya Tritura Baru pada tanggal 10 Januari oleh para mahasiswa yang berisi tiga tuntutan, yakni bubarkan aspri, turunkan harga, dan ganyang korupsi (Piliang.2012:358).

Pada tanggal 11 Januari 1974, Presiden Suharto menerima delegasi sejumlah mahasiswa untuk mengadakan pertemuan di Bina Graha, Jakarta. Sebelum diadakan pertemuan, para mahasiswa telah menyuarakan sindiran mengenai modal asing yang terlalu mendominasi di Indonesia, Namun Presiden Suharto saat itu tetap bersikap ramah saat menerima para mahasiswa pada pertemuan tersebut (Agustina,Widiarsi,dkk.2014:51).

Selama pertemuan, para mahasiswa menyampaikan sikap geram mereka melihat modal asing yang mengalir deras tanpa hambatan-hambatan. Namun hal tersebut mengakibatkan semakin besarnya aksi demonstrasi karena kekecewaan para mahasiswa kepada Presiden Suharto. Memasuki tanggal 12 Januari 1974, para mahasiswa mengadakan gerakan menyambut Kakuei Tanaka ke Indonesia sebagai pembuka dari gerakan demonstrasi mahasiswa pada tanggal 14 Januari 1974 (Padiatra.2015:113). Pada tanggal 14 Januari 1974, demonstrasi direalisasikan dengan aksi protes kedatangan Kakuei Tanaka di lapangan terbang Halim Perdanakusuma, serta memblokade jalan keluar bandar udara Kemayoran (Padiatra.2015:114).

Setelah berdemonstrasi pada tanggal 14 Januari 1974, puluhan perwakilan Dewan Mahasiswa Perguruan Tinggi se-Jawa menggelar rapat untuk evaluasi demonstrasi menyambut kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur (Padiatra.2015:114). Pada tanggal 15 Januari 1974, para mahasiswa berkumpul di kampus UI Salemba dan mengadakan long march ke Universitas Trisakti di kawasan Grogol dengan meneriakkan Tritura Baru 1974. Mereka bergerak dari kampus UI Salemba menuju Monas yang dalam perjalanannya massa mereka bertambah karena pelajar SMA ikut kedalam gerakan tersebut (Piliang.2012:358). Dalam aksi tersebut, muncul “unsur-unsur tidak terkontrol”, yakni membakari mobil Jepang, mengobrak-abrik toko-toko yang terus meluas di bagian kota Jakarta lainnya. Aksi pembakaran tersebut bukan hanya kendaraan perorangan dan swasta, kendaraan milik pemerintah dan ABRI turut menjadi korban (Piliang.2012:358). Menurut keterangan dari dr.Hariman Siregar dari wawancara beliau dengan Peter F. Gontha pada program televisi impact (2004), aksi bakar membakar tersebut berasal dari kelompok Islam. Hal itu dikemukakan ketika dr. Hariman dan beberapa dari mereka bertemu di penjara kala itu.

4.2.4 Akhir Gerakan Anti Modal Asing

Puncak dari gerakan anti modal asing ialah terjadinya peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974. Pasca terjadinya peristiwa tersebut pemerintah Orde Baru menjadi lebih represif dan otoriter. Namun disisi lain, pemerintah Orde Baru juga mencoba untuk mengakomodir apa yang dikatakan para mahasiswa dengan mengeluarkan instruksi presiden (INPRES) dan Trilogi Pembangunan pada tahun 1978, yang dimana trilogi pembangunan tersebut berisi stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pembangunan walau pada pelaksanaannya tidak terlalu banyak usaha untuk mewujudkannya (wawancara dr.Hariman Siregar dengan Peter F. Gontha.2004. *impact*).

5. Pembahasan

5.1 Analisis Terjadinya Gerakan Anti Modal Asing

Penanaman modal asing di Indonesia bukanlah menjadi suatu hal yang baru. Hal yang membedakannya adalah dari segi kepentingannya. Pada era Orde Baru, penanaman modal asing di Indonesia tidak terlepas dari berbagai situasi dan kondisi Indonesia saat itu, yakni krisis politik, krisis ekonomi, dan hubungan Indonesia dengan negara-negara barat. Pada tanggal 10 Januari 1967, Pemerintah mengeluarkan sebuah Undang Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Nomor 1 Tahun 1967 sebagai pedoman untuk para investor asing ketika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Berselang tiga bulan, investor asing yang berasal dari Amerika Serikat yakni Freeport Sulphur Incorporated menandatangani sebuah kontrak karya untuk mengeksplorasi dan menambah cadangan emas dan tembaga di Irian Jaya oleh ketua presidium Kabinet Ampera Jenderal Suharto. sejak saat itu, para investor asing berdatangan menanamkan modalnya di Indonesia, namun investor terbesar saat itu ialah berasal dari negara Jepang. Dalam pelaksanaannya, modal asing di Indonesia perlahan-lahan berubah menjadi sumber utama ekonomi Indonesia dan bukan menjadi pelengkap lagi. Industri-industri lokal mulai tergeser karena kalah saing dengan industri-industri impor. Hal ini yang kemudian menyebabkan adanya sentimen anti modal asing.

Sebelum mengkritik modal asing, para mahasiswa, beberapa cendekiawan, bahkan masyarakat telah melancarkan segala kritik dan protes nya sejak awal tahun 1970. Kritikan mereka saat itu ialah mengenai kenaikan harga bensin dan minyak tanah, kasus korupsi, sampai ke penentangan pembangunan Miniatur Indonesia Indah yang digagas oleh Ibu Tien

Suharto. Pada tahun 1973, para mahasiswa kemudian menyorot tentang strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang menurut mereka kurang tepat, serta menemukan adanya pelencengan tujuan penanaman modal asing di Indonesia. Sebagai wujud kritik mereka saat itu, para mahasiswa membuat petisi yang dinamakan Petisi 24 Oktober sebagai ungkapan ketidakpuasan dan tuntutan kepada Pemerintah Orde Baru yang dimana petisi tersebut memantik gerakan protes lebih militan kepada pemerintah Orde Baru yang memuncak pada Peristiwa Malari. Sejak pembacaan petisi tersebut, para mahasiswa semakin gencar mengadakan aksi demonstrasi yang kemudian memuncak pada tanggal 15 Januari 1974 dan dikenal sebagai peristiwa Malari.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dalam penelitian tentang Gerakan Anti Modal Asing Pada Awal Pemerintahan Orde Baru (1967-1974), gerakan ini pada awalnya hanya kritikan-kritikan tajam yang disampaikan melalui media massa seperti surat kabar, namun kritikan-kritikan tersebut berkembang menjadi sebuah demonstrasi. Gerakan ini

disebabkan oleh beberapa faktor, yakni;

1. Faktor utama ; Penilaian para mahasiswa dan masyarakat terhadap aliran modal asing di Indonesia yang kala itu dapat 'membunuh' pengusaha lokal dan memeras ekonomi Indonesia, arah pembangunan pemerintah Orde Baru yang lebih mengutamakan pertumbuhan dibandingkan pemerataan, serta adanya semangat dari peristiwa jatuhnya rezim perdana menteri Marsekal Thanom Kittikachorn di Bangkok pada bulan Oktober 1973 oleh para mahasiswa di Thailand,
2. Faktor pendukung ; Rivalitas antara asisten pribadi presiden (ASPRI) yakni Jenderal Sumitro dan Ali Murtopo, serta Kelompok islam yang terdiri dari pedagang-pedagang di bidang industri tekstil yang turut mendukung mahasiswa untuk mengkritik strategi pembangunan pemerintah Orde Baru yang menurut mereka merugikan pihaknya.

V.DAFTAR PUSTAKA

Abdullah,dkk. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah VIII*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Abdurrahman,D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Bergerak, HMI. 2019, 6 Mei. Hariman Siregar dan Cerita Gerakan Mahasiswa Malari (impact with Peter F. Gontha). YouTube.

Djojohadikusumo,Soemitro. 1972. *Kebijaksanaan di Bidang Ekonomi Perdagangan*. Jakarta: Yayasan Penyuluh Penerangan Perdagangan Ekonomi.

Gie. 2020. *Sistem Ekonomi: Pengertian, Fungsi, dan Jenisnya*. accurate.id. Diakses pada tanggal 2 September 2021 pukul 19.00 WIB.

Harjono, DK. 2012. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta Timur: Universitas Kristen Indonesia.

Hanggoro,T.H.2018. *Gerakan Menentang Pembangunan TMII, Gerakan Melawan Korupsi dari Bandung dan Yogyakarta*. Historia.id. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB dan 10.15 WIB.

Indonesia Raya. 1969 April 3. *Kontrak Karya Dengan ALCOA* Ditanda tangani. Halaman 3.

- Jazimah, Ipong. 2013. MALARI: Studi Gerakan Mahasiswa Masa Orde Baru. Sejarah dan Pembelajarannya. *Agastya*. Volume 3 No.1 Januari 2013.
- Kairupan, David. 2013. Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia. Jakarta: Kencana. Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Bantuan ODA Jepang di Indonesia. www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/. Diakses pada tanggal 3 September 2021 pukul 10.00 WIB.
- Kusumaningrum, Arin. 2019. *Awal Orde Baru*. Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas.
- Loulembah, Ichan. 2021, 13 April. Modal Asing itu Harus Dijadikan Suplemen-HarimanSiregar. Kosakata.YouTube.
- Monavita, Kemala N.A. 2018. Jejak Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dari Masa ke Masa. jeo.kompas.com. Diakses pada tanggal 2 September 2021 pukul 19.15 WIB.
- Mukhti, F.M.2018. Awal Mula Hostes di Jakarta. Historia.id. Diakses pada tanggal 23 Agustus 2022 pukul 19.00 WIB.
- Saefuloh, Ahmad Asep. 2017. Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Makro Ekonomi. berkas.dpr.go.id. Diakses pada tanggal 2 September 2021 pukul 20.00 WIB.
- Padiatra, Muara.A. 2015. Introduction To Malari : Dari Situasi, Aksi, Hingga Rusuh Pada Awal Orde Baru 1970 – 1974. Criksetra. Volume 4 No.8 Agustus 2015.
- Piliang, Indra.J. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 2011. *Sejarah Nasional Jilid VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pusat Data dan Analisa Tempo. 2020. *Kunjungan Penting Pemimpin Jepang Setelah Kerusuhan Malari*. Jakarta Selatan: Tempo Publishing.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.
- Usman, Sunyoto. 1999. Arah Gerakan Mahasiswa: Gerakan Politik atukah Gerakan Moral?. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 3 No.2 November 1999.
- Widiarsi, Agustina, dkk. 2014. *Massa Misterius Malari; Rusuh Politik Pertama dalam Sejarah Orde Baru*. Jakarta: Tempo Publishing.
- Wie, Kian Thee. 2012. *Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 7*. Jakarta: Ichtiar BaruVan Hoeve.